ABSTRAK

Skripsi dengan judul " Pertimbangan Hakim Tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)**"** ini ditulis oleh **Kelfin Arthadini Thuhevti NingTyas**, NIM. 12103183129, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum , Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, dibimbing oleh : Nurus Shobahah M.H.I.

Kata Kunci: Pengujian UU, Cipta Kerja, *maslahah mursalah***.**

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya ketakutan masyarakat terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia hal tersebut merupakan alasan kedaruratan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja sangat tidak beralasan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi indikator kegentingan memaksa akibat terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan fenomena stagflasi global dengan hal tersebut Undang-undang Cipta Kerja yang lahir di tengah pandemi COVID-19, telah bertransformasi menjadi fondasi yang kuat dalam membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan goncangan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Aspek kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam penerbitan perppu menyebabkan proses pembentukan Undang-undang yang berasal dari perppu memiliki keterbatasan/limitasi waktu karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan hakim dalam pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sifatnya membawa kedaruratan bagi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pengujian Undang-undang Cipta Kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?, 2) Bagaimana pertimbangan hakim tentang pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perspektif *Maslahah Mursalah*? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa pertimbangan hakim tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?, 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang pengujian Undang-undang Nomro 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, omnibus law, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen yang berupa bahan-bahan atau dokumen hukum. Teknik analisis bahan hukum menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber bahan hukum terkait dan menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan bahan hukum, peneliti menggunakan

triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada pertimbangan hakim tentang pengujian Undang-undang Cipta Kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bahwa Mahkamah Konstitusi memandang perlu waktu bagi pembentuk Undang-undang untuk melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Jika dalam waktu 2 Tahun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut berakibat hukum permanen. Oleh karena itu, Undang-undang atau Pasal-pasal atau materi muatan Undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan berlaku kembali dan menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan apabila menerbitkan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, secara umum menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta membatalkan keberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja. Sebab, adanya Frasa “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) Tahun sejak putusan ini diucapkan” menunjukan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memiliki kekuatan hukum mengikat sampai 2 (dua) Tahun kedepan, 2) Pertimbangan hakim dalam pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam prinsip *maslahah mursalah* sudah memberikan solusi yang tepat dalam pembentukan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan. Konsep maslahah dalam hal ini mengingat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* yaitu, suatu ketetapan hukum yang dibuat untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi manusia, dan tidak melanggar dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist tetapi hal ini membawa solusi bagi umat beragama pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Jadi, ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat

ABSTRACT

Thesis with the title "Judges' Consideration of the Job Creation Law in the Perspective of Maslahah Mursalah (Study on the Analysis of the Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020)" written by Kelfin Arthadini Thuhevti NingTyas, Registered Number Student, 12103183129. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung State Islamic University, 2024, Advisor: Nurus Shobahah M.H.I.

***Keywords*:** Law Testing, Job Creation, maslahah mursalah.

This research is motivated by the public's fear of the global economic crisis which is feared to have an impact on the Indonesian economy, which is the reason for the emergency to issue the Job Creation Perpu is very unreasonable. Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Job Creation) is an indicator of compelling urgency due to the weakening of economic growth along with the phenomenon of global stagflation. With this, the Job Creation Law, which was born in the midst of the COVID-19 pandemic, has been transformed into a strong foundation in bringing Indonesia to survive the uncertainty and economic shocks during the COVID-19 pandemic. The aspect of compelling urgency which is a requirement in the issuance of a Perpu causes the process of forming laws originating from Perpu to have time limitations because the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 needs to be implemented immediately because if it is not implemented, then efforts to adapt to the global situation are difficult to do. Therefore, there needs to be a judge's consideration in testing Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which is an emergency for the government for the benefit of the community.

The problem formulations in this study are: 1. How are the judges' considerations regarding the review of the Job Creation Law in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020?, 2) How is the judge's consideration of the review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 from the perspective of Maslahah Mursalah? The objectives of this research are: 1) To analyze the judges' consideration of the Job Creation Law in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, 2) To analyze the judges' consideration of the testing of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020 from the perspective of Maslahah Mursalah.

The research method used is normative legal research method through a statutory approach which includes Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, omnibus law, legal material collection techniques using document studies in the form of materials or legal documents. The technique of analyzing legal material uses a deepening of legal construction of documents and all sources of legal material related to and drawing conclusions. While checking the validity of legal materials, researcher use triangulation.

The results of this research show that: 1) In the consideration of the judges regarding the testing of the Job Creation Law in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, that the Constitutional Court considers that it takes

time for the legislators to improve the procedures in the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation during a grace period of 2 (two) years since the decision was pronounced. If within 2 years Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is not improved, the Constitutional Court declares that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has permanent legal consequences. Therefore, the Law or Articles or content material of the Law that has been revoked or amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is declared to be in effect again and suspends all actions or policies that are strategic and have a broad impact, and it is not justified to issue new implementing regulations that conflict with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Thus, it generally shows that Law Number 11 on Job Creation is contrary to the 1945 Constitution. So that the Constitutional Court Decision does not necessarily cancel the validity of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Because, the phrase "no improvement has been made within 2 (two) years since this decision was pronounced" shows that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation still has binding legal force for the next 2 (two) years, 2) The judge's consideration in examining Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the principle of maslahah mursalah has provided the right solution in law formation to realize human benefit, which means bringing benefits, rejecting harm and eliminating difficulties. The concept of maslahah in this case considering the decision of the Constitutional Court is in line with the principle of maslahah mursalah, namely, a legal provision made to provide benefits and welfare for humans, and does not violate the arguments in the Qur'an and Hadith but this brings solutions for religious people in general and Muslims in particular. So, the provision of law based on the maintenance of harm or stating that something is beneficial

الملخص

البحث العلمي تحت الموضوع "التأثير عن الحاكم لاختبار القانون جيفتا كرجا بنظر مسئلة المرسلة (الدراسة تحليلية لقرار المحكمة الدستورية رقم 91/-PUU 18-/2020)" كتبته **كيفين ارتاديني توهيتي نينجتياس**، رقم دفتر القيدة 12103183129، قسم قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة والقانون، الجامعة سيد علي رحمة الله الاسلامية الحكومية، 2024، والمشرف نور الصبابة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: اختبار القانون، جيفتا كرجا، مسئلة المرسلة.

والخلفية في هذا البحث يعني خوف المشاركة من الأزمة الاقتصادية العالمية التي يخشى أن يكون لها تأثير على الاقتصاد الإندونيسي، وهذا هو السبب عن حالة الطوارئ لإصدار لائحة جيفتا كرجا غير معقولة للغاية. التنظيم او القانون الحكومي بدلا من القانون (Perpu) رقم 2 لعام 2022 عن جيفتا كرجا (القانون Cipta Kerja) هو مؤشر على الإلحاح الملحة بسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي يتزامن مع ظاهرة الركود التضخمي العالمي. تحول قانون جيفتا كرجا، الذي ولد في خضم جائحة كوفيد-19، إلى أساس قوي قد جعل إندونيسيا تنجو من حالة عدم اليقين والصدمات الاقتصادية خلال جائحة كوفيد-19. تحول قانون جيفتا كرجا، الذي ولد في خضم جائحة كوفيد-19، إلى أساس قوي قد جعل إندونيسيا تنجو من حالة عدم اليقين والصدمات الاقتصادية خلال جائحة كوفيد-19. إن جانب الاستعجال الإجباري الذي هو شرط لإصدار القانون (Perppu) يتسبب أن يكون لعملية تشكيل القوانين المستمدة من القانون (Perppu) قيود زمنية لأن قرار المحكمة الدستورية رقم: 91 / -PUU-18 / 2020 يحتاج إلى التنفيذ على الفور لأنه إذا لم يتم تنفيذه، فسيكون من الصعب التكيف مع الوضع العالمي. ولذلك، من الضروري أن يأخذ القضاة في الاعتبار عند اختبار القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا وهو حالة طارئة للحكومة لصالح المجتمع.

واهداف البحث العلمي يعني كيف اعتبارات القضاة فيما يتعلق باختبار قانون جيفتا كرجا في قرار المحكمة الدستورية رقم 91 / PUU- 18 / 2020؟، 2) كيف اعتبارات القضاة فيما يتعلق باختبار القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن جيفتا كرجا في قرار المحكمة الدستورية للمحكمة الدستورية رقم 91 / PUU- 18 / 2020 منظور مصلحة؟. واما أهداف البحث العلمي يعني: 1) تحليل نظر القاضي في اعتبارات القضاة فيما يتعلق باختبار قانون جيفتا كرجا في قرار المحكمة الدستورية رقم 91 / PUU- 18 / 2020، 2) تحليل نظر القاضي في اعتبارات القضاة فيما يتعلق باختبار القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن جيفتا كرجا في قرار المحكمة الدستورية للمحكمة الدستورية رقم 91 / PUU- 18 / 2020 منظور مصلحة.

والطريقة المستخدمة يعني طريقة بحث قانونية معيارية بالمنهج تشريعي يتضمن القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن جيفتا كرجا، والقانون الشامل، وتقنيات في جمع البيانات القانونية باستخدام دراسات المستندات في شكل مواد أو مستندات قانونية. تستخدم تقنية تحليل البيانات القانونية تعميق البناء القانوني للوثائق وجميع المصادر ذات الصلة للمواد القانونية وتستخلص النتائج. وفي الوقت نفسه، للتحقق من صحة البيانات القانونية، يستخدم الباحث التثليث.

ونتائج هذا البحث العلمي يعني: 1) عند نظر القاضي في اختبار قانون جيفتا كرجا في قرار المحكمة الدستورية للمحكمة الدستورية رقم 91 / PUU- 17 /2020، ترى المحكمة الدستورية أنه من الضروري أن يقوم المشرعون بإجراء تحسينات في الإجراءات في تشكيل القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا خلال فترة سماح مدتها سنتان (2) منذ صدور القرار. إذا لم يتم تحسين القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا في غضون عامين، فإن المحكمة الدستورية تعلن أن القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا له عواقب قانونية دائمة. لذلك، فإن القانون أو المواد أو محتوى القانون الذي تم إلغاؤه أو تعديله بموجب القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا والذي أعلن أنه ساري المفعول مرة أخرى وتعليق جميع الإجراءات أو السياسات الاستراتيجية والتي لها تأثير واسع، ولا مبرر لها إذا أصدرت لوائح تنفيذية جديدة تتعارض مع القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا. وهكذا، فإنه يبين، بشكل

عام، أن القانون رقم 11 المتعلق بخلق فرص العمل يتعارض مع دستور عام 1945. بحيث لا يلغي قرار المحكمة الدستورية بالضرورة سن القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا. وذلك لأن عبارة "لم يتم إجراء أي تحسينات خلال عامين (2) منذ صدور هذا القرار" تظهر أن القانون رقم 11 لعام 2020 عن جيفتا كرجا لا يزال يتمتع بقوة قانونية ملزمة للعامين (العامين) المقبلين، 2) إن مراعاة القاضي في اختبار القانون رقم 11 لسنة 2020 عن جيفتا كرجا في مبدأ المصلحة المرسلة قد قدم الحل الصحيح في صياغة القوانين لتحقيق الفوائد البشرية، مما يعني تحقيق الأرباح ورفض الضرر وإزالة الصعوبات. مفهوم المصلحة في هذه القضية معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية يتماشى مع مبدأ المصلحة المرصالحة، وهو نص قانوني تم إنشاؤه لتوفير المنافع والرفاهية للإنسان، ولا يخالف المسلمات في القرآن والحديث، ولكن هذا يأتي بحل للمتدينين بشكل عام والمسلمين بشكل خاص. لذلك، الأحكام القانونية التي تستند إلى الحفاظ على الصحة أو القول بأن شيئا مفيدا.